

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jalan Jenderal Sudirman No 19

TANAH GROGOT

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang 1 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Piimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tanah Grogot, 12 Januari 2022

Sekretaris,

SUGIANTO, SH
NIP 19700705 199303 1 007



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	21
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	27
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	31
F. Pengungkapan Penting Lainnya	34
VI. Lampiran dan Daftar	35



PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

JALAN JEND SUDIRMAN NO.19 TANAH GROGOT

TELEPON/FAXIMILE 0543 21155

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanah Grogot, 12 Januari 2022
Sekretaris,



SUGIANTO, SH
NIP 19700705 199303 1 007

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Semester II Tahun Anggaran 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 11.438.351 atau mencapai 133,72 persen.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 3.818.860.071 atau mencapai 95,56 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 3.996.416.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp 18.299.570.807 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 3.017.000, Aset Tetap (neto) sebesar Rp 18.331.429.754 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 34.875.947 dan Rp 18.299.570.807.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 11.438.351, jumlah beban adalah juga sebesar Rp 4.671.141.185 sehingga terdapat

Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 4.659.702.834. Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa sebesar Rp 0 dan sehingga entitas masih pada posisi Defisit-LO sebesar Rp 4.659.702.834.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 18.614.448.451, Untuk Tahun 2021 untuk Ekuitas Awal sebesar Rp 18.614.448.451, kemudian dikurangi Defisit-LO sebesar Rp 4.659.702.834 kemudian ditambah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan sebesar Rp 3.996.400 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 4.340.828.790 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp 18.299.570.807.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 Desember 2021 DAN 2020

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATA TAN	31 Desember 2021		% thd Angg	31 Desember 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	8.554.000	11.438.351	133.72	7.312.745
JUMLAH PENDAPATAN		8.554.000	11.438.351	133.72	7.312.745
BELANJA					
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2	2.968.515.000	2.834.579.894	95.49	3,191,239,991
Belanja Barang	B.3	990.401.000	946.780.177	95.60	884,687,122
Jumlah Belanja Operasi		3.958.916.000	3.781.360.071	95.51	4.075.927.113
Belanja Modal					
Belanja Peralatan dan Mesin	B.4	37.500.000	37.500.000	100	362,458,000
Jumlah Belanja Modal		37.500.000	37.500.000	100	362.458.000
JUMLAH BELANJA		3.996.416.000	3.818.860.071	95.56	4.438.385.113

II. NERACA

**PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
NERACA
PER 31 Desember 2021**

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Desember 2021	30 Juni 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	30.000.000
Belanja dibayar di muka (prepaid)	C.2	0	0
Persediaan	C.3	3.017.000	4.944.000
Jumlah Aset Lancar		3.017.000	34.944.500
ASET TETAP			
Tanah	C.4	14.452.813.000	14.452.813.000
Peralatan dan Mesin	C.5	2.277.195.228	2.164.998.286
Gedung dan Bangunan	C.6	6.326.821.544	5.868.301.416
Aset Tetap Lainnya	C.7	9.885.147	9.695.147
Akumulasi Penyusutan	C.8	(4.735.285.165)	(4.301.426.179)
Jumlah Aset Tetap		18.331.429.754	18.194.381.670
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.9	4.850.000	4.850.000
Aset Lain-lain	C.10	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.11	(4.850.000)	(4.850.000)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		18.334.446.754	18.229.326.170
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka KPPN	C.12	0	30.000.000
Utang kepada Pihak Ketiga	C.13	34.875.947	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		34.875.947	30.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN		34.875.947	30.000.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.14	18.299.570.807	18.199.326.170
JUMLAH EKUITAS		18.299.570.807	18.199.326.170
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		18.334.446.754	18.229.326.170

III. LAPORAN OPERASIONAL

**PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**
(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	11.438.351	7.312.745
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		11.438.351	7.312.745
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	2.839.965.544	3.187.892.991
Beban Persediaan	D.3	66.730.500	53.226.500
Beban Barang dan Jasa	D.4	548.753.500	539.973.022
Beban Pemeliharaan	D.5	296.193.202	259.021.103
Beban Perjalanan Dinas	D.6	46.075.612	32.586.320
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	873.422.827	870.284.882
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		4.671.141.185	4,942,984.818
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.659.702.834)	(4.935.672.073)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	1.390.600
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	1.881.000
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	(490.400)
POS LUAR BIASA		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(4.659.702.834)	(4.936.162.473)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
EKUITAS AWAL	E.1	18.614.448.451	22.326.093.556
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(4.659.702.834)	(4.936.162.473)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS *)	E.4	3.996.400	0
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.4	0	0
Koreksi Lain-lain	E.4.5	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	4.340.828.790	1.224.517.368
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	(314.877.644)	(3.711.645.105)
EKUITAS AKHIR	E.7	18.299.570.807	18.614.448.451

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Tanah Grogot

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Pengadilan Negeri Tanah Grogot merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum, sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Entitas berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No 19 Tanah Grogot, Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Negeri Tanah Grogot berkomitmen dengan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang Agung. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi.
2. Peningkatan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan tertib administrasi perkara.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Peningkatan kualitas pengawasan.
6. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
7. Peningkatan pelayanan peradilan.
8. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
9. Peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI yang sebelumnya terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), bertransformasi menjadi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dimana aplikasi ini mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada sebelumnya. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan fungsi SIMAK-BMN di dalam SAKTI adalah menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Tanah Grogot menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah sebagai berikut :

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO **(2) Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu juta rupiah).
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai

atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara.

Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Piutang belum jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Piutang tidak dilunasi pada saat jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) tahun sejak jatuh tempo;	10%
Diragukan	Piutang tidak dilunasi lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo	50%
Macet	Piutang tidak dilunasi lebih dari 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo	100%

*Penyusutan
Aset Tetap*

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan;
 - c. Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
 - d. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akruwal
Pertama Kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akruwal Pertama Kali

Mulai tahun 2018 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akruwal sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akruwal. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akruwal pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2018.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Rp 11.438.351

B.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 11.438.351. Pendapatan Pengadilan Negeri Tanah Grogot terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2021		
	Estimasi	Realisasi	% Real. Angg.
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	8.554.000	11.438.351	133.72
Pendapatan Lain-lain	0	0	0.00
Jumlah	8.554.000	11.438.351	133.72

Realisasi pendapatan 31 Desember 2021 Diperoleh dari Anggaran Sewa Rumah Dinas.

Perbandingan Realisasi Pendapatan

31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2021	REALISASI 30 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	11.438.351	7.312.745	63.93
Pendapatan Lain-lain	0	0	0,00
Jumlah	11.438.351	7.312.745	63.93

Belanja

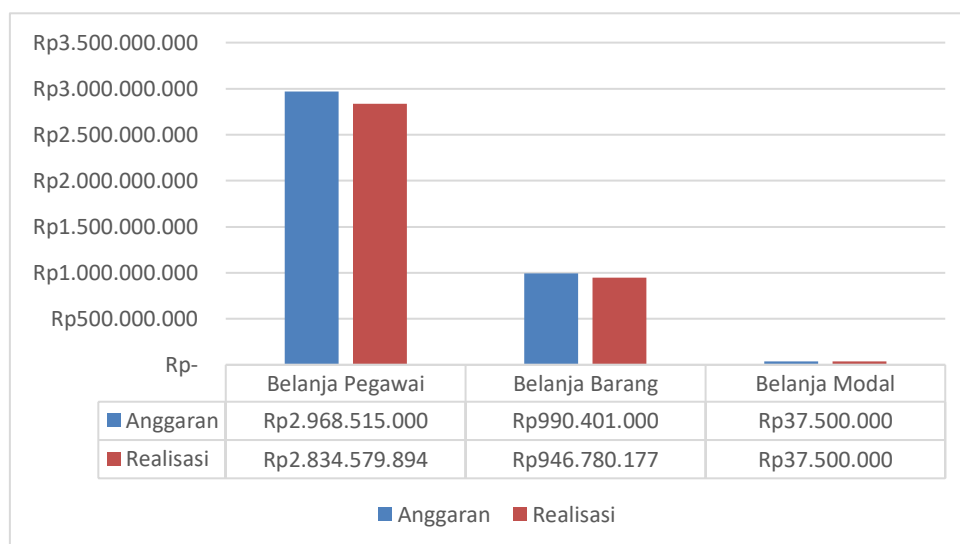
Realisasi Belanja
Negara
Rp 3.818.860.071

Realisasi belanja Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 3.818.860.071 atau 95.00 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 3.996.416.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Belanja Pegawai	2,968,515,000	2,834,579,894	95
Belanja Barang	990,401,000	946,780,177	96
Belanja Modal	37.500.000	37.500.000	100
Jumlah Belanja Kotor	3,996,416,000	3,818,860,071	96
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah	3,996,416,000	3,818,860,071	96

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 16.22 persen dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan penyesuaian anggaran untuk

pagu anggaran tahun 2021 dikarenakan terjadinya pandemi covid-19. Hal ini menyebabkan realisasi anggaran menurun dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja

31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2021	REALISASI 31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2,834,579,894	3,191,239,991	(12.58)
Belanja Barang	946,780,177	884,687,122	6.55
Belanja Modal	37.500.000	362,458,000	(866.55)
Jumlah	3,818,860,071	4,438,385,113	(16.22)

B.2. Belanja Pegawai

Belanja

Pegawai Rp

2.834.579.894

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 2.834.579.894 dan Rp 3.191.239.991.

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 12.57 persen dari 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian anggaran untuk belanja pegawai dikarenakan pandemi covid-19.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai

31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2021	REALISASI 31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.834.579.894	3.191.239.991	(12.58)
Belanja Lembur	0	0	0,00
Jumlah Belanja Pegawai Kotor	2.834.579.894	3.191.239.991	(12.58)
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0,00
Jumlah Belanja Pegawai	2.834.579.894	3.191.239.991	(12.58)

B.3. Belanja Barang

Belanja Barang
Rp 390.015.036

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 390.015.036 dan Rp 356.487.436. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021 mengalami Kenaikan sebesar 8.6 persen dari Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2020. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya kenaikan belanja barang operasional, belanja barang persediaan, belanja jasa, dan belanja pemeliharaan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Barang
31 Desember 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2021	REALISASI 31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional (5211)	434.452.032	405.819.367	6.6
Belanja Barang Non Operasional (5212)	5.000.000	0	100
Belanja Barang Persediaan (5218)	66.684.000	55.395.400	16.93
Belanja Jasa (5221)	98.375.331	62.203.167	36.77
Belanja Pemeliharaan (5231)	296.193.202	259.021.103	12.55
Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)	46.075.612	32.586.320	29.28
Jumlah Belanja Barang	946.780.177	884.687.122	6.56

B.4. Belanja Modal

Belanja Modal
Rp 37.500.000

Realisasi Belanja Modal 31 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 37.500.000 dan 362.458.000.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
31 Desember 2021 dan 2020*

Uraian	REALISASI 31 Desember 2021	REALISASI 31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (5321)	37.500.000	193.478.000	(415.94)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan (5331)	0	168.980.000	(100)
Jumlah Belanja Modal Kotor	37.500.000	362.458.000	(866.55)

Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	37.500.000	362.458.000	(866.55)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp 0*

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 30.000.000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31 Desember 2021	30 Juni 2021
BRI 653244003021000	0	0
Uang Tunai	0	86.671
Kuitansi UP	0	29.913.329
Jumlah	0	30.000.000

*Belanja dibayar
dimuka
(prepaid) Rp 0*

C.2. Belanja dibayar di muka (prepaid)

Jumlah belanja dibayar di muka per 31 Desember 2021 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 yang merupakan pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja/pemerintah.

Rincian Belanja dibayar di muka(prepaid) adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja dibayar di muka (prepaid)

Keterangan	31 Desember 2021	30 Juni 2021
Belanja Gaji pokok PNS	0	0
Belanja pembulatan gaji PNS	0	0
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	0

Belanja Tunj. Anak PNS	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan
Rp 3.017.000

C.3. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 30 Juni 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 3.017.000 dan Rp 4.944.500.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	31 Desember 2021	30 Juni 2021
Barang Konsumsi	3.017.000	4.944.500
Jumlah	3.017.000	4.944.500

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Berita Acara Opname Fisik Nomor : W18-U5/1902.A/PL.03/XII/2021 Tanggal 31 Desember 2021.

Tanah Rp.
14.452.813.000

C.4. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Negeri Tanah Grogot per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 14.452.813.000.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	4.000 m2	Jl.Jenderal Sudirman No.19 T.Grogot	8.175.960.000
2	1.256 m2	Jl.RM Noto Sunardi Tanah Grogot	2.012.112.000

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2021**

3	1.200 m2	Jl.RM Noto Sunardi Tanah Grogot	1.904.400.000
4	493 m2	Jl.RA Kartini Tanah Grogot	828.240.000
5	1.007 m2	Jl.Gajah Mada Tanah Grogot	1.532.101.000
Jumlah			14.452.813.000

*Peralatan dan
Mesin Rp
2.277.195.228*

C.5. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 2.277.195.228 dan 2.164.998.286.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2021	2.164.998.286
Mutasi Tambah	132.178.942
Mutasi Kurang	19.982.000
Saldo per 31 Desember 2021	2.277.195.228
Akumulasi penyusutan s.d. 31 Desember 2021	1.828.484.760
Nilai Buku per 31 Desember 2021	448.710.468

*Gedung dan
Bangunan Rp
6.326.821.544*

C.6. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 6.326.821.544 dan 5.868.301.416.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2021	5.868.301.416
Mutasi Tambah	458.520.128
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2021	6.326.821.544
Akumulasi penyusutan s.d. 31 Desember 2021	2.908.277.797
Nilai Buku per 31 Desember 2021	3.418.543.747

Rincian saldo Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Gedung dan Bangunan

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	1035 m2	Jl.Jenderal Sudirman No.19 Tanah Grogot	3.975.422.000
2	72 m2	Jl.Jenderal Sudirman No.19 Tanah Grogot	458,520,128
3	104 m2	Jl.Jenderal Sudirman No.19 Tanah Grogot	50,346,209
4	14 m2	Jl.Jenderal Sudirman No.19 Tanah Grogot	52,601,808
5	253 m2	Jl.Jenderal Sudirman No.19 Tanah Grogot	148,500,000
6	79 m2	Jl.Jenderal Sudirman No.19 Tanah Grogot	73,446,399
7	153 m2	Jln. Gajah Mada Tanah Grogot	426,209,000
8	90 m2	Jln. Gajah Mada Tanah Grogot	286,207,000
9	73 m2	Jln. R. A. Kartini Tanah Grogot	162,225,000
10	78 m2	Jln. R.M. Noto Sunardi	173,336,000
11	78 m2	Jln. R.M. Noto Sunardi	173,336,000
12	78 m2	Jln. R.M. Noto Sunardi	173,336,000
13	78 m2	Jln. R.M. Noto Sunardi	173,336,000
Jumlah			6.326.821.544

*Aset Tetap
Lainnya Rp
9.885.147*

C.7. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 9.885.147. Aset tetap tersebut berupa buku-buku diperpustakaan.

Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini hingga 31 Desember 2021.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap Rp
4.735.285.165

C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 4.318.652.765. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Semester II tahun 2021*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.277.195.228	1.828.484.760	448.710.468
2	Gedung dan Bangunan	6.326.821.544	2.906.800.405	3.418.543.747
3	Aset Tetap Lainnya	9.885.147	0	9.885.147
Akumulasi Penyusutan		8.613.901.919	4.735.285.165	3.877.139.362

Aset Tak
Berwujud Rp
4.850.000

C.9. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 4.850.000 dan Rp. 4.850.000.

Aset Lain-lain
Rp 0

C.10. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan 606.250.

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi Aset
Lainnya Rp
4.850.000

C.11. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 4.850.000 dan Rp 4,243,750.

*Utang kepada
Pihak Ketiga Rp
34.875.947*

C.12. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 34.875.947 dan Rp 18.564.160. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Nilai Utang kepada Pihak Ketiga pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 34.875.947 telah diselesaikan pembayaran dan penyalurannya kepada pihak ketiga yang berhak pada Januari 2022.

*Ekuitas Rp
18.299.570.807*

C.13. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 18.299.570.807 dan Rp 18.614.448.451. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP
Rp 11.438.351

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 11.438.351 dan Rp 7.312.745 Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
per 31 Desember 2021 dan 2020*

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	11.438.351	7.312.745
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah	11.438.351	7.312.745

Beban Pegawai
Rp
2.834.579.894

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 2.834.579.894 dan Rp 3.191.239.991. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	2.834.579.894	3.191.239.991
Jumlah	2.834.579.894	3.191.239.991

D.3. Beban Persediaan

Beban
Persediaan
Rp 66.684.000

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 66.684.000 dan Rp 55.395.400. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang
dan Jasa
Rp 537.827.363

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 537.827.363 dan Rp 537.684.299. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban Belanja Barang Operasional	434.452.032	405.819.367
Beban Belanja Barang Non Operasional	5.000.000	0
Beban Langganan Daya dan Jasa	98.375.331	131.864.932
Jumlah	537.827.363	537.684.299

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp 296.193.202

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 296.193.202 dan Rp 259.021.103 dan Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	162.180.500	129.120.500
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	58.117.334	58.175.291
Beban Pemeliharaan Jaringan	75.895.368	71.725.312
Jumlah	296.193.202	259.021.103

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp 46.075.612*

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 46.075.612 dan Rp 32.586.320. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban Perjalanan Dinas	46.075.612	32.586.320
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0
Jumlah	46.075.612	32.586.320

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp 873.422.827*

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 873.422.827 dan Rp 870.284.882. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi karena adanya penyusutan untuk aset tetap dan amortisasi untuk aset tak berwujud.

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

31 Desember 2021 dan 2020

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	198,618,842	199,459,848
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	674,197,735	669,612,534
Beban Amortisasi Software	606.250	1,212,500
Jumlah	873.422.827	870.284.882

D.8. Kegiatan Non Operasional

*Surplus/Defisit
dari Kegiatan
Non
Operasional
Rp 0*

Defisit dari kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 490.400. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2021 dan 2020*

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Pendapatan dari Penyesuaian Nilai BMN	0	1.390.600
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	1.881.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	(490.400)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp
18.614.449.451*

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 18.614.449.451 dan Rp 22.326.093.556.

*Defisit LO Rp
4.659.702.834*

E.2. Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 4.659.702.834 dan Rp 4.936.162.473 Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

*Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/Kes
alahan
Mendasar Rp 0*

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu Rp 0 dan Rp0.

*Penyesuaian
Nilai Aset Rp 0*

E.4.

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp
0*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0. Rincian Koreksi Nilai

Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Jumlah	0

E.4.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp 0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Koreksi Nilai Saldo Awal	0
Jumlah	0

E.4.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi Rp
3.996.400*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 3.996.400. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4.5 Koreksi Lain-lain

*Koreksi Lain-
lain Rp 0*

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Desember 2021 dan 2020 adalah 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar
Entitas Rp
4.340.828.790*

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 4.340.828.790 Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

Transaksi antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.818.860.071
Diterima dari Entitas Lain	11.438.351
Transfer Masuk	190.000
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	533.217.070
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	4.340.828.790

E.6. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir Rp
18.299.570.807*

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 18.299.570.807 dan Rp 18.614.448.451.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Grogot A/C 653244003021000 a.n. BPG 047 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 0.
2. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Grogot A/C 654444003031000 a.n. BPG 047 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 0.

3. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Grogot A/C 021401000730305 a.n RPL 047 PN TANAH GROGOT UNTUK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 39.546.892.

F.2. REVISI DIPA

Hingga 31 Desember 2021, Pengadilan Negeri Tanah Grogot melakukan 4 kali Revisi DIPA baik POK maupun Revisi DIPA.

F.3. RALAT SPM, SP2D, SSBP DAN SSPB

Hingga tanggal 31 Desember 2021, Pengadilan Negeri Tanah Grogot tidak ada mengajukan ralat SPM, SP2D, SSBP dan SSPB.

F.4. PAGU MINUS BELANJA PEGAWAI

Hingga 31 Desember 2021, Pengadilan Negeri Tanah Grogot belum terdapat Nilai Pagu Minus.

F.5. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2021 dan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : W18-U5/653/KP.01.2/05/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerima/Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran : SUGIANTO, SH

Pejabat Pembuat Komitmen : SUGIANTO, SH

Pejabat Penguji SPP dan
Penandatangan SPM : MUHYIDIN, SH

Bendahara Pengeluaran : IRWAN D

Bendahara Penerimaan : AGUS MUHARI